

BAB 3

UUD NRI TAHUN 1945 DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi bab ini, peserta didik diharapkan mampu:

- menjelaskan keberadaan UUD NRI Tahun 1945;
- mengidentifikasi periodisasi pemberlakuan UUD NRI Tahun 1945;
- menguraikan proses perubahan UUD NRI Tahun 1945; dan
- menerangkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi.



A. UUD NRI Tahun 1945

Sebagai konstitusi, artinya UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum tertinggi yang menjadi patokan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertinggi dalam negara, yaitu menghadirkan keadilan (*justice*); memberi ketertiban (*order*); dan mewujudkan nilai-nilai ideal, seperti kebebasan (*freedom*) serta kemakmuran dan kesejahteraan (*prosperity and welfare*) bersama.



A. UUD NRI Tahun 1945



Sumber: *Id.Wikipedia.org*

Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPK dibubarkan dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI mengadakan sidang pertamanya tanggal 18 Agustus 1945 dengan agenda menetapkan dan mengesahkan Rancangan UUD yang disusun BPUPK.



B. Periodisasi Pemberlakuan UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi



Sumber: *Id.Wikipedia.org*

Dalam pelaksanaannya, sempat terjadi beberapa penyimpangan yang dilakukan pemerintah pada masa awal kemerdekaan (1945–1949).



B. Periodisasi Pemberlakuan UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi



Sumber: [shutterstock.com](https://www.shutterstock.com)

Sejak 17 Agustus 1950, RIS bubar dan Indonesia kembali berbentuk kesatuan. Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950.



B. Periodisasi Pemberlakuan UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi



Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menetapkan Keputusan Presiden No. 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.

Sumber: *Id.Wikipedia.org*



C. Perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945

Perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Perubahan dilakukan sebanyak satu kali dalam empat tahap dari tahun 1999 hingga tahun 2002.



Sumber: *Id.Wikipedia.org*

C. Perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945

Prinsip-Prinsip Perubahan

- a. Tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
- b. Mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
- d. Memasukkan materi yang normatif, yang ada pada Penjelasan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh) UUD NRI Tahun 1945.
- e. Melakukan perubahan secara addendum.



C. Perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945

Empat tahap amandemen UUD NRI Tahun 1945

14 – 19 Oktober
1999
Mengubah 25
pasal

1 – 18 Agustus 2000
Mengubah 9 pasal

1 – 18 November
2001
Mengubah 23
pasal

1 – 10 Agustus 2002
Mengubah 13 pasal,
3 pasal Aturan
Peralihan, 2 pasal
Aturan Tambahan



C. Perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945

Secara kualitatif, amendemen UUD NRI Tahun 1945 menghasilkan perubahan-perubahan sebagai berikut (Taufiqurrohman Syahuri, 2011).

- a. Posisi MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Anggotanya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu.
- b. Kekuasaan pembentukan UU tidak lagi dipegang presiden melainkan oleh DPR.
- c. Kewenangan presiden mengangkat dan menerima duta negara lain serta memberi amnesti dan abolisi tidak lagi sebagai hak prerogratif presiden, tetapi harus atas pertimbangan DPR.
- d. Adanya penambahan lembaga baru, antara lain DPD, Mahkamah Konstitusi, Komisi yudisial, Komisi Pemilihan Umum, dan Bank Sentral.
- e. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan lagi oleh MPR.
- f. Pemilihan kepala daerah secara demokratis, yang sebelumnya diusulkan oleh DPRD kepada presiden.
- g. Penambahan ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia.
- h. Penambahan ketentuan mengenai tata cara perubahan UUD.



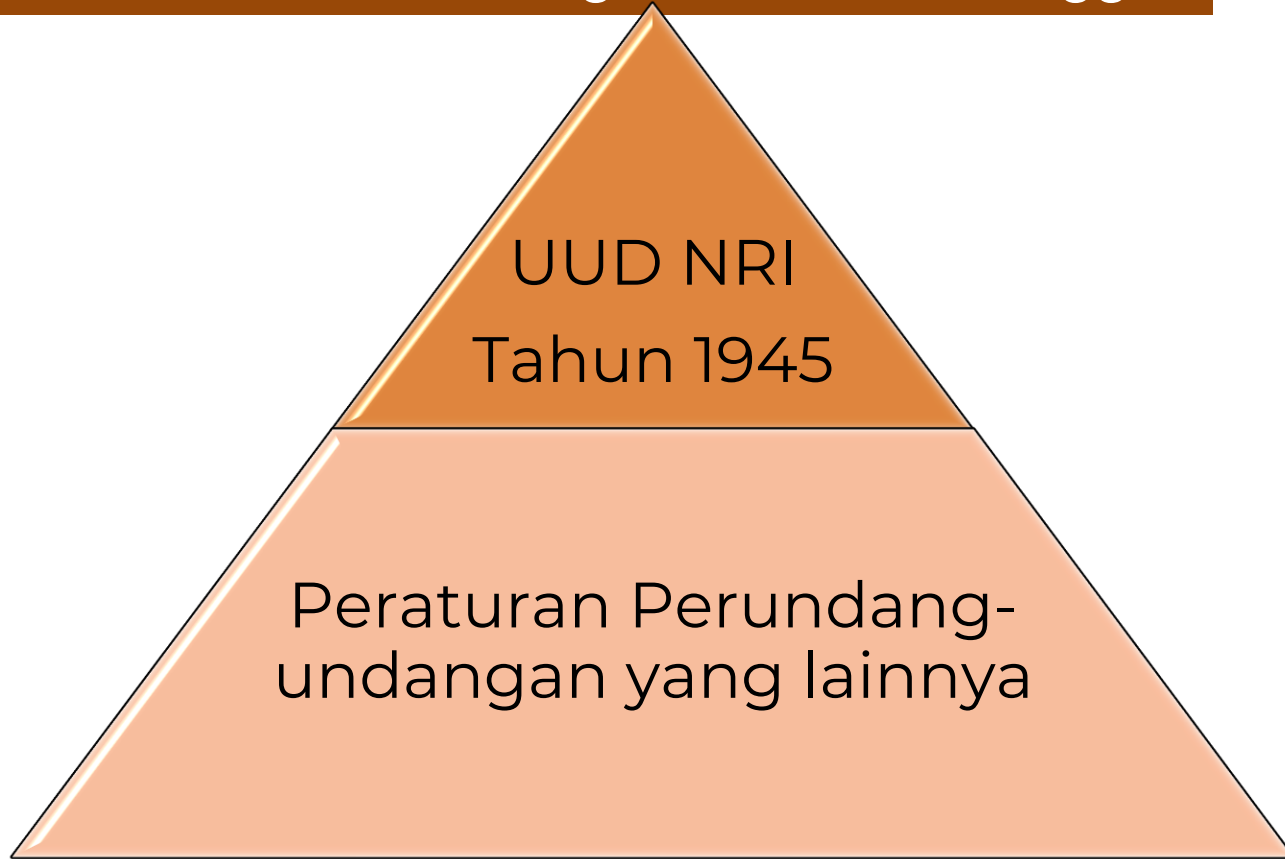
D. UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Hukum Tertinggi

Keterkaitan antara Pembukaan dan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 mencakup hal-hal berikut (Herdiawanto, dkk., 2019).

- a. Suasana kebatinan
- b. Cita-cita hukum.
- c. Penjabaran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.



D. UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Hukum Tertinggi



Sumber Gambar:

- *www.shutterstock.com*
- *www.Id.Wikipedia.org*

